

12-30-2013

ANALISIS RASIO LANCAR RUMAH SAKIT X

Marsdenia Marsdenia

Program Studi Akuntansi Program Vokasi Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi>



Part of the [Accounting Commons](#), [Arts Management Commons](#), [Business Administration, Management, and Operations Commons](#), [Business Analytics Commons](#), [Educational Administration and Supervision Commons](#), [Insurance Commons](#), and the [Tourism and Travel Commons](#)

Recommended Citation

Marsdenia, Marsdenia (2013) "ANALISIS RASIO LANCAR RUMAH SAKIT X," *Jurnal Vokasi Indonesia*: Vol. 1: No. 2, Article 4.

DOI: 10.7454/jvi.v1i2.1048

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol1/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Vokasi Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP) DI KANTOR AKUNTANSI REGIONAL JAKARTA

Titis Wahyuni^{1*}

¹*Program Studi Akuntansi Program Vokasi Universitas Indonesia*

ABSTRAK - Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang dilaksanakan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) melalui Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia serta hasil-hasil yang diharapkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam sistem akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bergantung pada keakuratan dan validitas input data transaksi. Dengan demikian keakuratan dan validitas dari laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan bergantung pada kualitas kerja yang dilakukan oleh KAR dalam mengelola input data transaksi keuangan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta dan juga menganalisis proses yang dilaksanakan oleh KAR Jakarta pada tahun 2000–2001. Analisis dilakukan pada subsistem pengolahan data transaksi penerimaan (*Cash Receipt*) dan pengeluaran kas pemerintah (*Cash Disbursement*) serta subsistem buku besar (*General Ledger*) dengan menggunakan *Analysis Critical Success Factor (CSF)*, *Performance Grid*, *Proses Modeling*, *Data Modeling*, and *Network Modeling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah/kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah. Kemudian, dengan menggunakan hasil penelitian dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan.

Kata kunci: SAPP, KAR, *process modeling*, *data modeling*, *critical success factor*.

ABSTRACT - *This research is intended to describe Central Government Accounting System (SAPP) implemented by the State Financial Accounting Agency (BAKUN) through The Regional Accounting Office (KAR) and the expected outcomes of Central Government Accounting System. In an accounting system, financial statements generated rely on the accuracy and validity of data input transactions. The accuracy and validity of the Government's financial statements generated will depend on the quality of the work done by KARs in managing the Government's financial transaction data input.*

The method used in this research is by analyzing the problems/obstacles faced by KAR Jakarta and also analyzing the process performed by KAR Jakarta during 2000 – 20001. Analysis was performed on cash receipt transaction data processing subsystem (Cash Receipt) and government cash expenditures (Cash Disbursement), and general ledger subsystem (General Ledger) used and done by using Analysis Critical Success Factor (CSF), Performance Grid, Proses Modeling, Data Modeling, and Network Modeling. The result of this research shows that there are some problems/obstacles faced by KAR in managing data of financial transactions of the Government. By using these results are then made efforts to repair the running system.

Keywords: Central Government Accounting System, Regional Accounting Office, Central Accounting System, process modeling, data modeling, critical success factor.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk akibat gejolak politik yang tak kunjung selesai memaksa pemerintah untuk mencari dukungan dana dari luar negeri untuk membiayai negara ini. Dengan tingkat inflasi yang tinggi serta defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah Indonesia dan masalah-masalah lain yang dialami oleh pemerintah, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memantau kinerja pemerintah (terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi) sehingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia dapat diperbaiki sedikit demi sedikit atau setidaknya tidak semakin memburuk. Sistem informasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti berapa aset, hutang, pendapatan, dan biaya yang terjadi layaknya sebuah neraca serta informasi penting lainnya. Dengan menggunakan sistem informasi ini kinerja pemerintah dapat dipantau dan pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan konkrit dalam memperbaiki kondisi perekonomian negara ini.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) untuk menata administrasi negara. SAPP telah dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran 1993/1994 dan pada tahun anggaran 1999/2000 telah mencakup seluruh Departemen/Lembaga diseluruh

propinsi. SAPP adalah suatu sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dan proses elektronik untuk mengambil data, membukukan, dan melaporkan semua transaksi keuangan, aset, hutang, dan ekuitas dari seluruh Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya. SAPP terdiri dari dua subsistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Tanggung jawab SAI diserahkan kepada Kepala Departemen/Lembaga dalam hal ini Menteri/Ketua dibantu oleh unit akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal sedangkan tanggung jawab SAP diserahkan kepada Menteri Keuangan yang dibantu oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN).

Setiap subsistem utama dibagi menjadi beberapa subsistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntansi dan informasi dari pemakai tertentu. Subsistem dalam SAP dan SAI didesentralisasikan di propinsi-propinsi. Masing-masing subsistem akan memenuhi tujuan-tujuan informasi akuntansi dan pengawasan dari setiap instansi atau bagian dari Pemerintah Pusat. Secara keseluruhan sistem akuntansi ini akan memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, para pengambil keputusan tingkat tinggi pemerintah, dan pihak yang berkepentingan lainnya informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu mengenai realisasi anggaran serta posisi keuangan dari seluruh Pemerintah Pusat atau dari masing-masing instansi.

Input SAPP adalah berupa dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah seperti SPM (Surat Perintah Membayar), SSP

(Surat Setoran Pajak), SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), SSBC (Surat Setoran Bea Cukai), arsip data komputer aset tetap, arsip data komputer transaksi interregional dan lain-lain sedangkan *output* yang dihasilkan oleh SAPP adalah laporan keuangan tingkat proyek, laporan realisasi anggaran pendapatan, neraca anggaran rutin, dan Perhitungan Anggaran Negara. Pemrosesan input untuk SAPP dilakukan oleh Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. KAR adalah instansi vertikal BAKUN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAKUN. Dalam menyelenggarakan tugasnya KAR berfungsi sebagai pengumpulan dan verifikasi dokumen transaksi keuangan pemerintah, pengolahan data transaksi keuangan pemerintah, pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi, pelaksanaan sistem akuntansi pusat, analisis laporan keuangan pemerintah, bimbingan teknis SAP termasuk Sistem Akuntansi Aset Tetap kepada unit-unit akuntansi di wilayah kerjanya, dan pelaksanaan administrasi KAR.

Pada suatu sistem akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan sangat bergantung pada keakuratan dan keabsahan input data transaksinya. Berdasarkan fungsi tersebut di atas berarti bahwa input SAPP dari setiap transaksi keuangan pemerintah berada di bawah tanggung jawab KAR. Ini berarti bahwa tugas yang diemban oleh KAR sangat penting. Keakuratan dan keabsahan laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan

tergantungan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh KAR dalam mengelola input data transaksi keuangan pemerintah. Akan tetapi seringkali muncul kendala-kendala/masalah-masalah dalam pengolahan input sehingga *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak akurat. Padahal hasil yang akurat hanya dapat dicapai jika input yang dimasukkan juga akurat.

II. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis beberapa permasalahan terkait penggunaan Sistem Akuntansi Pusat oleh KAR Jakarta berikut ini, yaitu:

1. Seperti apakah proses yang terjadi pada KAR Jakarta?
2. Apakah masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah?
3. Bagaimana mengatasi masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya tentang proses yang terjadi pada KAR Jakarta.
2. Memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya tentang masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah
3. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah-masalah/kendala-

kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta sehingga dapat memperoleh solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis masalah/kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta dan proses yang saat ini dilaksanakan oleh KAR Jakarta. Metoda dan teknik yang digunakan dalam analisis adalah dengan *Critical Succes Factor* (CSF) bagi KAR Jakarta, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan *Network Modeling*. Selanjutnya berdasarkan teori-teori yang didapat daristudi literatur akan dicari pemecahannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. ANALISIS

a. Gambaran Umum Sistem Akuntansi pada KAR Jakarta

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari subsistem-subsistem: pengeluaran (*Cash Disbursement/CD*), penerimaan (*Cash Receipt/CR*), anggaran (*Budgeting*), aset tetap (*Fixed Asset/FA*), inveslasi permanen (*Permanent Investment/PI*), dan hutang jangka panjang (*Long-term Liabilities/LTL*). Pada prakteknya, subsistem-subsistem tersebut dikerjakan oleh berbagai instansi. Berikut ini disajikan tabel yang menjelaskan tentang instansi dan subsistem yang digunakan oleh instansi tersebut.

Tabel 1.1
 Instansi dan Subsistem yang Digunakan

No.	Subsistem	Pengolahan Data Dilakukan oleh	Keterangan
1.	CD	KAR,KAK	<ul style="list-style-type: none"> KAR hanya mengolah data pengeluaran kas negara yang dilakukan oleh KPKN. KAK hanya mengolah data pengeluaran kas negara yang dilakukan DJA Pusat.
2.	CR	KAK, KAR	<ul style="list-style-type: none"> KAR hanya mengolah data penerimaan kas negara yang dilakukan oleh KPKN. KAK hanya mengolah data penerimaan kas negara yang dilakukan DJA Pusat.
3.	Budgeting	KAK	
4.	GL	KAK, KAR	
5.	FA	Instansi (Kantor/Proyek)	
6.	PI	KAK	Yang melaporkan datanya adalah penanggung jawab investasi.
7.	LTL	KAK	Yang melaporkan datanya adalah penanggung jawab hutang.

Subsistem-subsistem yang Digunakan oleh KAR Jakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta menggunakan subsistem-subsistem berikut ini untuk menjalankan fungsinya:

- *Subsistem cash disbursement (pengeluaran)*

Subsistem ini digunakan untuk mengolah semua dokumen sumber pengeluaran pemerintah yang diterima Kantor Akuntansi Regional dari Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA). Dokumen sumber tersebut adalah dalam bentuk SPM (Surat Perintah Membayar). Adabanyak jenis format SPM, yaitu: (a) format untuk rutin, pembangunan, UYHD rutin, UYHD pembangunan, PFK yang tidak dianggarkan, (b) Format untuk SPM U PEMDA, (c) Format untuk pendapatan yang dibayarkan kembali.

Cash disbursement termasuk *cash transfer-out* dan dokumen WP yang telah dibayar. SPM dapat dikelompokkan secara logik ke dalam berikut ini: (a) Pengeluaran rutin, (b) Pengeluaran pembangunan, termasuk transaksi-transaksi BA16 berdasarkan allotmen DIP, (c) UYHD rutin, pembayarannya melalui kas yang dibayar dimuka, (d) PFK yang tidak dianggarkan termasuk SPM U PEMDA, (e) Pembayaran kembali pendapatan, termasuk pembayaran pajak, pembayaran bea dancukai dan pembayaran pendapatan lainnya, (f) transfer kas keluar (g) WP yang telah dibayarkan.

Selain dokumen sumber pengeluaran KTUA juga memberikan *fileinterface* arsip data komputer (ADK) dan print out

rekapitulasi P7 yang biasanya dibuat per Bagian Anggaran. Dokumen sumber tersebut diterima, diteliti dan dibukukan oleh sub bagian umum KAR. Dokumen sumber akan diberikan ke seksi verifikasi untuk dibatch dan dibandingkan dengan *Register* Transaksi Harian (RTH) yang dicetak oleh Seksi pengolahan Data Akuntansi (SPDA). Sedangkan *fileinterface* (ADK) diberikan kepada SPDA. SPDA mencetak RTH yang kemudian dikirim ke seksi verifikasi, dan membentuk GL *entries* pengeluaran.

- *Subsistem cash receipt (penerimaan)*

Subsistem ini digunakan untuk mengolah semua dokumen sumber penerimaan pemerintah yang diterima Kantor Akuntansi Regional dari Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA). Dokumen tersebut berbentuk SSP untuk pendapatan dari penerimaan pajak, VAT receipt, rental tax receipt, dan penerimaan pajak lainnya.

- a) SSBC untuk pendapatan bea dan cukai
- b) SSBP untuk pendapatan bukan pajak, seperti pendapatan dari minyak, pendapatan sewa, pendapatan dari penjualan, dan pendapatan lainnya.
- c) SSBP UYHD untuk UYHD Rutin dan UYHD Pembangunan.
- d) KU-In untuk transfer kas.

Berdasarkan informasi dari dokumen sumber di atas, untuk semua dokumen kecuali KU-In akan disusun dan dibatch menurut urutan berikut ini: (a) Wilayah KPKN, (b) Bagian Anggaran dan Eselon I, (c) Kode BKPP, (d) Kode KPKN.

Untuk KU-In, dokumen akan dibatch menurut urutan Kode KPKN, Kode BKPP, Tanggal dokumen dari transaksi asal.

Selain dokumen sumber penerimaan KTUA juga memberikan *fileinterface* arsip data komputer (ADK) dan *print out* rekapitulasi P7 yang biasanya dibuat per Bagian Anggaran. Dokumen sumber tersebut diterima, diteliti dan dibukukan oleh sub bagian umum KAR. Dokumen sumber akan diberikan ke seksi verifikasi untuk dibatch dan dibandingkan dengan *Register* Transaksi Harian (RTH) yang dicetak oleh Seksi pengolahan Data Akuntansi (SPDA). Sedangkan *fileinterface* (ADK) diberikan kepada SPDA. SPDA mencetak RTH yang kemudian dikirim ke seksi verifikasi, dan membentuk GL *entries* penerimaan.

- *Subsistem general ledger (buku besar)*

Pada subsistem ini semua GL *entries* yang dihasilkan oleh subsistem pengeluaran maupun penerimaan akan diposting ke buku besar sehingga membentuk GL detail. Dari GL detail akan dicetak daftar transaksi dan posting (DT&P). GL detail dan DT&P ini kemudian dikirim oleh KAR ke instansi-instansi Kantor Pusat BAKUN, Unit Akuntansi Wilayah (UAW), dan Unit Akuntansi Eselon (UAE). Jika terjadi kesalahan misalnya ada data yang belum terekam atau data yang salah maka UAW akan membuat memo penyesuaian (MP) untuk kesalahan tersebut dan mengirimkan MP tersebut ke KAR. Oleh KAR MP tersebut dibagikan ke seksi verifikasi untuk dibatch

dan ke SPDA. SPDA kemudian akan membetulkan kesalahan yang terjadi berdasarkan MP yang diterima. SPDA akan mencetak RTH MP untuk diperiksa oleh seksi verifikasi. Jika masih ada yang salah maka seksi verifikasi akan memberikan tanda pada RTH untuk diperbaiki oleh SPDA. Setelah RTH dinyatakan benar maka akan dilakukan posting transaksi MP ke buku besar.

Subsistem - subsistem tersebut dikerjakan oleh Kantor Akuntansi Regional Jakarta melalui 4 bagian yang dimilikinya, yaitu sub bagian umum, seksi verifikasi, Seksi Pengolahan Data Akuntansi (SPDA), dan seksi Konsolidasi. Adapun tugas dan urutan kerja yang dilakukan oleh bagian tersebut adalah:

Sub Bagian Umum:

- a) Menerima arsip data komputer (ADK) *interface* dan dokumen sumber (DS) dariKTUA.
- b) Membukukan penerimaan.
- c) Menyerahkan ADK ke seksi PDA dan DS ke seksiverifikasi.

Seksi Verifikasi:

- a) Menerima DS dari sub bagian umum.
- b) Membagikan DS ke pelaksana.
- c) Menerima dan membagikan *Register* Transaksi Harian (RTH).
- d) Mencocokkan RTH dengan DS.
- e) Mencocokkan RTH perbaikan.
- f) Meminta pembentukan GL *entries*.
- g) Menerima dan membagikan data transaksi dan *posting* (DT&P).
- h) Membuat pengantar ADK dan DT&P ke instansi.

- i) Mengirim ke instansi.

Seksi PDA:

- a) Menerima ADK darisub bagian umum.
- b) Konversi data
- c) *Interface* data.
- d) Mencetak RTH
- e) Mengirim RTH ke verifikasi.
- f) Memperbaiki RTH.
- g) Mengirim RTH perbaikan.
- h) Menerima permintaan pembentukan GL *entries*.
- i) Menyetujui pembentukan GL *entries*.
- j) Membentuk GL *entries*.
- k) Mengirim GL *entries* ITR (interegional) ke KAK.
- l) Menerima GL *entries* ITR dari KAK.
- m) Melakukan posting.
- n) Mencetak DT&P.
- o) Mengirim DT&P ke verifikasi.
- p) Mencetak *register* pengiriman GL detail untuk KP BAKUN, UAW dan UAE.
- q) Download ke ADK KP BAKUN, UAW, dan UAE.

Apabila ada estimasi pendapatan, saldo awal harus diinput. Setelah itu urutan kerja sama dengan dari poin d sampai j. Sebelumnya tabel saldo sudah diterima dari KAK bersama dengan *allotmentnya*.

Seksi Konsolidasi:

Membuat laporan gabungan dari semua transaksi yang terjadi. Laporan konsolidasi dapat berupa laporan gabungan transaksi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun.

Menurut BAKUN (1999) SAPP adalah suatu sistem terpadu yang menggabungkan

prosedur manual dan proses elektronis untuk mengambil data, mernbukukan, dan melaporkan atas semua transaksi keuangan, aset, hutang, dan ekuitas dari seluruh pemerintah pusat dan instansi-instansinya. SAPP terdiri dari dua subsistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI. Tanggung jawab SAI diserahkan kepada Kepala Departemen/Lembaga dalam hal ini Menteri/Ketua dibantu oleh unit akuntansidi bawah Sekretaris Jenderal sedangkan tanggung jawab SAP diserahkan kepada Menteri Keuangan yang dibantu oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). SAP mempunyai dua subsistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan dilaksanakan oleh BAKUN melalui Kantor Akuntansi Regional (KAR) didaerah dan Kantor Pusat BAKUN di Jakarta, yaitu Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN). SAU membukukan dan melaporkan secara sentral mengenai AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), alotment dan estimasi pendapatan,pendapatan dan belanja yang direalisasi, aset lancar, aset permanen, aset tetap, asetlain-lain, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang, saldo dana lancar (surplus atau defisit), dan ekuitas dana yang diinveslasikan yang berasal dari transaksi instansi-instansiPemerintah Pusat. Sedangkan SAKUN meliputi perkiraan-perkiraan dana/kas pusat yang dipelihara oleh unit-unitdibawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), khususnya Kantor Perbendaharaan danKas Negara (KPKN), Direktorat Tata

Usaha Anggaran (DTUA), dan Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara (DPKN). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat kaitan antara Sistem KAR, SAP, dan SAI.

Kaitan Antara Sistem KAR, SAP, dan SAI

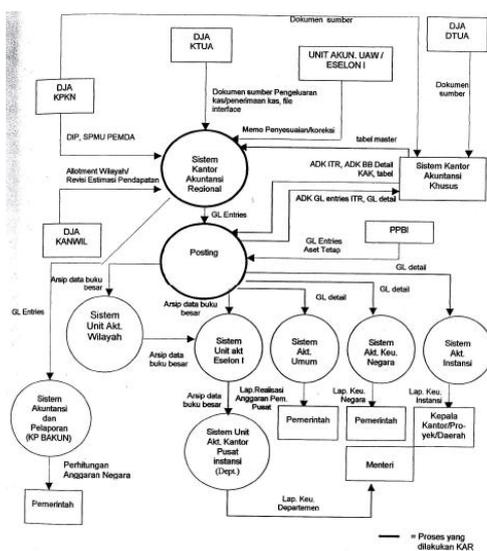
Proses SAPP di BAKUN oleh KAR dan KAK. Pada KAR dokumen sumbernya berasal dari:

- a) DJA KTUA (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Tata Usaha Anggaran), berupa dokumen sumber pengeluaran kas/penerimaan kas & file interface.
- b) DJA KPKN (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan & Kas Negara), berupa DIP dan SPMU PEMDA.
- c) DJA KANWIL (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Wilayah), berupa altotment (kredit anggaran) wilayah/revisi estimasi pendapatan.
- d) Unit Akuntansi UAW Eselon I, berupa memo penyesuaian/koreksi

- e) PPBI (Pembantu Penguasa Barang Inventaris) yang merupakan instansis etingkat kantor wilayah, berupa arsip data komputer aset tetap.
- f) KAK (Kantor Akuntansi Khusus) berupa tabel master, arsip data komputer buku besardetail KAR Khusus dan arsip data komputer interregional.

Pada KAK dokumen sumbernya berasal dari DJA DTUA dan DJA KPKN yang diolah dan menghasilkan tabel master, arsip data komputer buku besar detail KAR Khusus dan arsip data komputer interregional. Hasil-hasil inilah yang dikirim ke KAR.

Semua dokumen sumber tersebut masuk ke KAR dan diproses. Hasil dari proses tersebut adalah GL detail yang dipisah-pisahkan menurut instansi (arsip data buku besar).GL yang telah dipisah-pisahkan ini kemudian dikirim oleh UAW ke UAEI dan dari UAEI dikirim ke UAKPI.



Gambar 1.1
 Kaitan antara KAR, SAP dan SAR

SAU, SAKUN, dan SAI memperoleh arsip buku besar detail dari KAR. Kemudian setiap sistem berdasarkan arsip data buku besar detail yang diperoleh dari KAR akan diolah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan diberikan kepada:

- Laporan keuangan dari SAU akan diberikan kepada pemerintah.
- Laporan keuangan dari SAKUN akan diberikan kepada pemerintah.
- Laporan keuangan dari SAI akan diberikan kepada Kepala Kantor/proyek/Daerah

Sementara itu di UAKPI data diproses untuk menghasilkan laporan Realisasi Anggaran tingkat kantor maupun tingkat proyek dan neraca percobaan untuk setiap departemen per wilayah. Laporan-laporan ini kemudian diverifikasi terhadap dokumen sumbernya.

Seharusnya jika diperiksa, laporan yang dihasilkan oleh UAKPI akan memiliki jumlah yang sama dengan laporan PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang dihasilkan oleh KP BAKUN. Akan tetapi karena fasilitas yang ada di UAKPI kurang memadai maka laporan yang dihasilkan menjadi tidak sama.

b. Masalah dan atau Kendala-kendala yang Dihadapi oleh KAR Jakarta

Masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta antara lain:

1. Kelengkapan dokumen sumber.

Dokumen sumber banyak yang tidak lengkap sehingga tidak diketahui secara pasti

berapa jumlah SPM (Surat Perintah Membayar), SSP (Surat Setoran pajak), SSBP (surat setoran Bukan pajak), dan SSBC (surat setoran Bea dan cukai).

Ketidaklengkapan tersebut dapat berupa:

- Arsip Data Komputer (ADK, berupa disket dari I(TUA) ada tetapi dokumen sumbernya (DS) belum ada.
- Arsip Data Komputer ada, dokumen sumber ada tetapi tidak lengkap.
- Arsip Data Komputer tidak ada tetapi dokumen sumber ada.

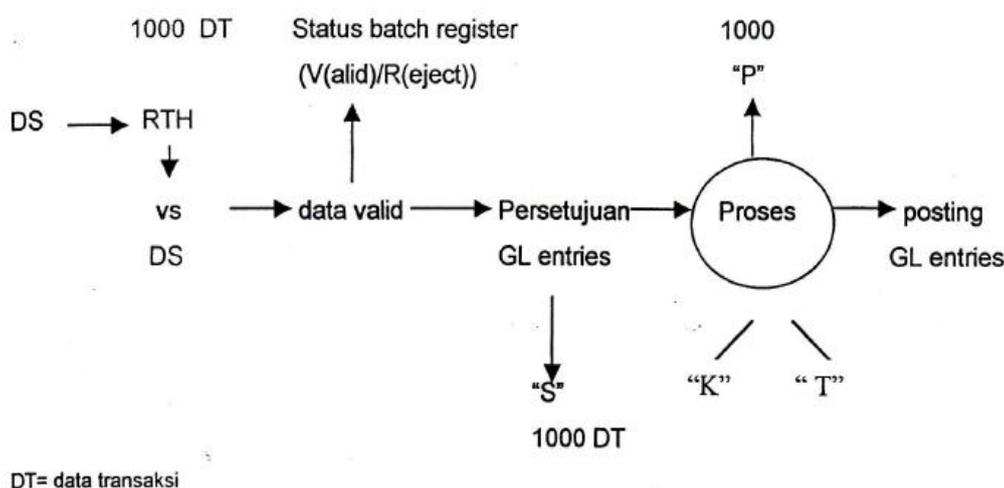
Untuk mengatasi hal tersebut beberapa langkah yang telah ditempuh oleh KAR adalah:

- Jika arsip data komputer ada tetapi dokumen sumbernya belum ada biasanya dipecahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya jika menghadapi hal yang sama.
- Jika arsip data komputer ada, dokumen sumber ada tetapi tidak lengkap biasanya dipecahkan dengan : SPM yang ada dianggap benar, dihitung, kemudian dicocokkan dengan rekapitulasi PT kemudian dibandingkan dengan RTH. RTH dibandingkan/diperiksa lagi berdasarkan dokumen pendukungnya seperti Daftar Isian Kegiatan dan Daftar Isian Proyek. Rekapitulasi P7 dibuat dari ADK yang diterima kemudian dibuat rekapitulasinya berdasarkan kode BA (Bagian Anggaran). Atau dipecahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya jika menghadapi hal yang sama.

- Jika arsip data komputer tidak ada tetapi dokumen sumber ada maka staf SPDA di KAR harus menginput data berdasarkan dokumen sumber yang diterima. Dokumen sumber biasanya terdiri dari dua unsur, yaitu:
 - Fisik berupa disket yang berisi arsip data komputer.
 - Elemen data. Misalnya elemen data untuk SPM adalah:
 - kegiatan lain (Daftar Isian

- Kegiatan/Daftar Isian proyek)
 - Sektor Subsektor Program (SSP)
 - MAK/MAP,
 - BA-ES seperti SKO dan DIK S

2. Masalah verifikasi yang belum cermat
 Urutan prosesnya adalah sebagai berikut (pekerjaan ini dikerjakan oleh seksi verifikasi):



Gambar 1.2
 Urutan Kerja Seksi Verifikasi

RTH (*Register Transaksi Harian*) yang telah dicetak oleh SPDA akan diperiksa oleh seksi verifikasi. RTH dibandingkan dengan dokumen sumber yang ada (misalnya ada 1000 transaksi). Setelah RTH dibandingkan dengan dokumen sumber dan data dinyatakan valid (benar) maka status *batch register* akan menunjukkan huruf "V" yang berarti benar ada 1000 transaksi. Pada saat *GL entries* terbentuk dan statusnya adalah "S" (setuju) maka itu berarti bahwa transaksi yang terbentuk pada *GL entries* juga 1000

transaksi. Dan pada saat terjadi proses *GL entries* status akan menunjukkan "P" (proses) yang berarti juga ada 1000 transaksi yang siap untuk diposting. Akan tetapi ternyata 1000 transaksi yang diwakili oleh status-status "V", "S" dan "P" tersebut ternyata tidak benar-benar 1000 transaksi.

3. Program konversi yang digunakan oleh KAR Jakarta masih kurang sempurna.

ADK *interface* dari KTUA dibuat dengan menggunakan *Dbase III+* sedangkan sistem di KAR dibuat dengan menggunakan sistem

UNIX dan bahasa pemrograman PowerHouse. ADK *interface* dari KTUA tersebut harus dikonversi dari *file.DBF* menjadi *file.TXT* terlebih dahulu agar dapat digunakan oleh sistem KAR Jakarta. Akan tetapi pada *file* hasil konversi masih terdapat data yang lolos atau tidak terproses sehingga tidak dapat dibuatkan rekapitulasi dari data penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Biasanya berdasarkan arsip data komputer yang masuk, KAR akan membuat rekapitulasi pengeluaran maupun penerimaan berdasarkan bagian anggaran.

4. Elemen data SPM yang belum benar.

Pada SPM terdapat informasi tentang kantor yang menerima dana serta kode bagian anggaran (kode departemen) dari kantor tersebut. Ternyata terdapat ketidakcocokan data antara kantor yang menerima dana dan kode bagian anggarannya pada SPM yang dikeluarkan oleh KPKN. Sistem yang ada di KAR Jakarta saat ini belum memiliki mekanisme untuk mencek/memeriksa hal tersebut sehingga terjadi perbedaan pencatatan transaksi antara instansi/kantor

II. PEMBAHASAN

a. Critical Success Factor bagi KAR Jakarta

Tujuan KAR Jakarta adalah untuk menyediakan daftar transaksi dan posting (DT&P) serta arsip data BB yang akurat dan benar bagi Kantor pusat BAKUN, Unit Akuntansi Wilayah (UAW), dan Unit Akuntansi Tingkat Eselon (UAE) untuk digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan laporan keuangan pemerintah,

yang menerima dana dengan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh KAR Jakarta.

5. Kurangnya motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KAR Jakarta adalah jenis pekerjaan yang rutin dan membutuhkan ketelitian yang tinggi (antara lain seperti meneliti kelengkapan dokumen sumber, memeriksa data transaksi harian dan mencocokkannya dengan dokumen sumber) sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kejenuhan para pegawai. Kondisi yang seperti ini ditambah dengan kurangnya ganjaran yang diberikan terhadap para pegawai membuat kurangnya motivasi para pegawai tersebut dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh KAR Jakarta menjadi kurang optimal dan akurat. Padahal hasil kerja yang optimal dan akurat dibutuhkan karena *output* yang dihasilkan oleh sistem KAR Jakarta menjadi dasar bagi pembuatan laporan keuangan pemerintah.

laporan keuangan tingkat wilayah, laporan keuangan kantor/proyek, dan laporan keuangan tingkat eselon, laporan keuangan tingkat departemen/instansi.

Agar KAR Jakarta dapat mencapai tujuan tersebut maka *Critical Success Factor* (CSF) yang harus dimiliki adalah:

1. Dokumen sumber yang lengkap.

Pada sistem akuntansi, dasar dari pembuatan jurnal adalah adanya dokumensumber yang merekam transaksi

yang dilakukan. Tanpa adanya dokumen sumbermaka pembukuan yang dilakukan adalah tidak benar dan tidak akurat.

2. *Pegawai yang memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.*

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KAR Jakarta adalah jenis pekerjaan yang rutin, membutuhkan ketelitian dan tidak bervariasi sehingga menimbulkan kejenuhan para pegawainya. Sebagai instansi yang bertugas untuk menyediakan data dasar bagi pembuatan laporan keuangan pemerintah yang nantinya laporan tersebut digunakan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, Pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah maka KAR Jakarta harus memiliki pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehingga data yang dihasilkan adalah data yang benar dan akurat.

3. *Prosedur verifikasi yang baik*

Agar data transaksi dan posting serta GL detail yang dihasilkan akurat maka KAR Jakarta harus prosedur verifikasi yang baik sehingga kesalahan sekecil apapun dapat ditemukan. Dengan demikian maka data yang dihasilkan menjadi akurat.

4. *Infrastruktur yang memadai pada instansi terkait.*

Sistem KAR berhubungan dengan instansi lain seperti KPKN, KTUA, UAW, UAE, DJA dan lain-lain. Instansi-instansi tersebut harus memiliki

infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk mengolah data yang akan dikirim ke KAR sehingga hasil kerja KAR Jakarta dapat selesai tepat pada waktunya karena hasil kerja KAR Jakarta diperlukan oleh instansi/lembaga lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, anggaran, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah dan mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN) serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

5. *Membuat sistem baru yang terpadu atau memperbaiki sistem yang sudah ada.*

Hal ini perlu dilakukan agar dapat menghasilkan data yang benar, akurat, dan lebih cepat tersaji sehingga laporan yang dihasilkan juga menjadi laporan yang benar, akurat, dan tepat waktu.

• *Membuat sistem baru yang terpadu*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sistem KAR berhubungan dengan instansi lain seperti KPKN, KTUA, UAW, UAE, DJA dan KP BAKUN sehingga akan lebih baik jika dibangun sistem baru yang terpadu. Terpadu berarti meliputi seluruh bagian yang terkait dan terintegrasi. Ini diperlukan agar aliran data antar instansi yang berhubungan dapat berjalan dengan lebih lancar sehingga

informasi yang dibutuhkan dapat segera dihasilkan.

- *Memperbaiki sistem yang ada*

Memperbaiki sistem yang ada berarti tetap mempertahankan sistem yang ada dan menambahkan beberapa prosedur yang sangat dibutuhkan serta memperbaiki beberapa prosedur yang kurang baik. Untuk sistem KAR Jakarta beberapa prosedur yang harus diperbaiki atau dibuatkan prosedur baru adalah:

- ✓ *Prosedur penerimaan dokumen sumber.*

Diperlukan prosedur perbaikan untuk mengatasi ketidaklengkapan dokumen sumber sehingga dapat diketahui secara pasti berapa pengeluaran dan pendapatan pemerintah pada suatu waktu tertentu.

- ✓ *Prosedur untuk verifikasi*

Meskipun sudah dilakukan verifikasi dan pencocokan antara RTH dan dokumen sumber tetapi masih juga terdapat kesalahan pada RTH sehingga prosedur yang ada perlu diperbaiki agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

- ✓ *Prosedur input data dokumen sumber yang tidak disertai ADK.*

Prosedur ini perlu dibuat agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

- ✓ *Prosedur untuk mengecek kesamaan antara kode kantor dan kode bagian anggaran pada SPM.*

Prosedur ini perlu dibuat agar terdapat kesesuaian antara uang yang dikeluarkan oleh KPKN dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang menerima.

- ✓ *Membuat program konversi data yang lebih sempurna*

Program konversi data yang lebih sempurna perlu dibuat mengingat KAR Jakarta menerima dokumen sumber dalam bentuk arsip data komputer dari sistem KTUA yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda dengan bahasa pemrograman pada sistem KAR Jakarta. Dengan demikian maka proses konversi yang dilakukan akan sempurna (tidak ada data yang lolos).

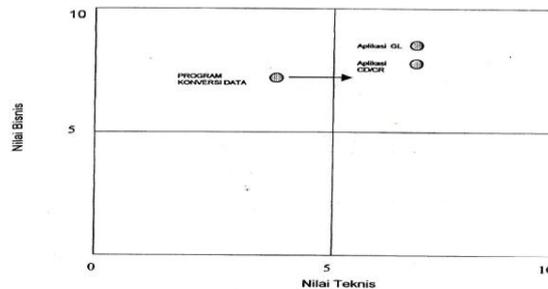
b. Evaluasi Perangkat Lunak Aplikasi Sistem Informasi

Dari gambar 5 di bawah ini diketahui bahwa:

- Aplikasi GL data mempunyai nilai atau manfaat tertinggi bagi KAR Jakarta, disusul oleh aplikasi CD dan CR serta program konversi data.
- Aplikasi GL, CD, dan CR memiliki nilai bisnis dan teknis yang tinggi sehingga aplikasi tersebut harus dipelihara, ditingkatkan, dan dikembangkan lebih lanjut.

- Program konversi data memiliki nilai bisnis yang tinggi namun nilai teknisnya rendah, maka aplikasi ini harus diperbarui.
- Secara keseluruhan aplikasi sistem informasi yang ada mempunyai nilai teknis

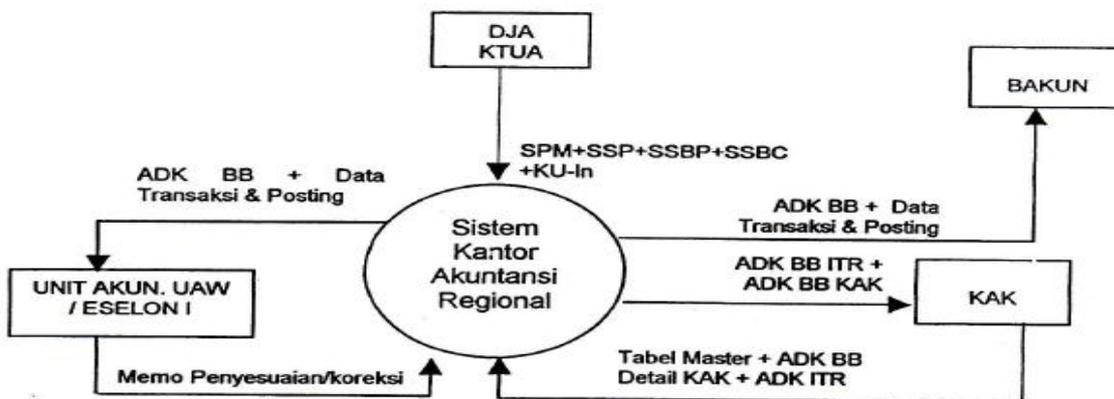
antara 4 dan 8 pada skala 0 sampai 10, yang berarti belum cukup memuaskan pemakai akhir dan perlu ditingkatkan serta disempurnakan lebih lanjut



Gambar 1.3
 Grid Evaluasi Perangkat Lunak

➤ **Process Modeling**

Diagram konteks untuk Kantor Akuntansi Regional Jakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1,4
 Diagram Konteks Kantor Akuntansi Regional Jakarta

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa Sistem Kantor Akuntansi Regional mendapat masukan dari :

- DJA KTUA (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Tata Usaha Anggaran), berupa dokumen sumber pengeluaran kas/penerimaan kas & file interface.
- KAK (Kantor Akuntansi Khusus) berupa tabel master, arsip data komputer buku

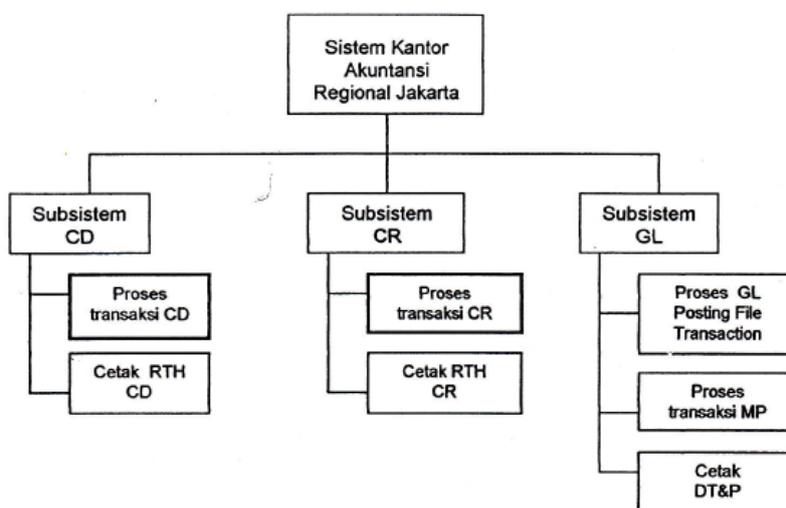
besar detail KAR Khusus dan arsip data komputer interregional.

- Unit Akuntansi UAW Eselon 1, berupa memo penyesuaian koreksi
 Semua data tersebut diolah oleh KAR dan menghasilkan keluaran yang akan dikirim ke:

- KAK, berupa arsip data komputer buku besar intereregional dan arsip data komputer aset tetap.
- Unit akuntansi *UAW/Eselon I*, berupa arsip data komputer buku besar, daftar transaksi dan posting serta laporan lainnya.
- BAKUN, berupa arsip data komputer buku besar dan daftar transaksi dan posting.

➤ **Functional Decomposition Diagram**

Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta mengerjakan 3 subsistem dari SAPP, yaitu: subsistem *Cash Disbursement* (pengeluaran), subsistem *Cash Receipt* (penerimaan), dan subsistem *General Ledger* (buku besar). *Functional Decomposition Diagram* Akuntansi Regional adalah sebagai berikut.



Gambar 1.5
 Functional Decomposition Diagram
 Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta

➤ **Event-Response List**

Subsistem *Cash Disbursement*

No.	Event
1	KAR menerima ADK <i>interface</i> / dokumen sumber dari KTUA.
2	SPDA mengkonversi data (ADK) yang diterima dari Sub bagian Umum.
3	Verifikasi mencocokkan DS pengeluaran pemerintah Oengan RTH.
4	SPDA memperbaiki RTH.
5	Seksi verifikasi meminta pembentukan

	GL <i>entries</i> kepada SPDA.
--	--------------------------------

Subsistem *Cash Receipt*

No.	Event
1	KAR menerima ADK <i>interface</i> / dokumen sumber penerimaan pemerintah dari KTUA
2	SPDA rnengkonversi data (ADK) yang diterima dari Sub Bagian Umum.
3	Seksi verifikasi rnencocokkan DS pengeluaran pemerintah dengan RTH

No.	Event
4	SPDA memperbaiki RTH.
5	Seksi verifikasi meminta pembentukan GL <i>entries</i> kepada SPDA

Subsistem *General Ledger*

No.	Event
1	SPDA melakukan posting.
2	SPDA mencetak DT&P.
3	Seksi verifikasi membuat pengantar ADK dan DT&P untuk instansi.
4	Pencetakan <i>register</i> pengiriman GL detail untuk KP BAKUN, UAW, dan UAE oleh SPDA.
5	Ekspor <i>file</i> GL detail ke KP BAKUN, KAK, UAW, dan UAE.
6	Memasukkan transaksi MP dari UAW ke subsistem buku besar.
7	Pemeriksaan RTH oleh seksi verifikasi.
8	Pembentukan GL <i>entries</i> MP.
9	Posting batch MP ke buku besar.

➤ *E-R Modeling (Data Modeling)*

Sesuai dengan ruang lingkup dalam proses kegiatan KAR Jakarta, dapat diidentifikasi yang berikut ini:

Jenis entity

<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi • SPM • Jenis SPM • Sifat SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti Penerimaan Kas • P • Cara Setor • Perkiraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis belanja • Cara bayar • Bank • GL <i>Entries</i> • Jenis perkiraan
---	--	---

Jenis Relasi

Entity	Relasi	Entity
Organisasi	Memiliki	SPM Bukti penerimaan
Perkiraan	Menerima	SPM GL <i>Entries</i>
Bank	Membayar	SPM
P	Berada pada	GL <i>Entries</i> Organisasi
Cara setor	Berada pada	Bukti penerimaan kas
Jenis perkiraan	Berada pada	Bukti penerimaan kas
Jenis belanja	Berada pada	SPM
Cara bayar	Berada pada	SPM
Jenis SPM	Berada pada	SPM
Sifat SPM	Berada pada	SPM

Cardinality

Entity/Relationship	Cardinality
Organisasi dan SPM	1:M
Organisasi dan Bukti penerimaan	1:M
Perkiraan dan SPM	1:M
Perkiraan dan GL <i>Entries</i>	1:M
Perkiraan dan Bukti penerimaan	1:M
Banks dan SPM	1:M
P dan GL <i>Entries</i>	1:M
P dan Organisasi	1:M
Cara setor dan Bukti penerimaan	1:M
Jenis perkiraan dan Bukti penerimaan	1:M
Jenis belanja dan SPM	1:M
Cara bayar dan SPM	1:M
Jenis SPM dan SPM	1:M
Sifat SPM dan SPM	1:M

Atribut dan Entity atau Relationship

Entity/Relationship	Atribut
Organisasi	Kode organisasi Nama organisasi Alamat organisasi Kode wilayah
Wilayah	Kode wilayah Deskripsi wilayah
SPM	No SPM Tanggal SPM Tahun Anggaran Kode jenis belanja Kode organisasi yang mengeluarkan

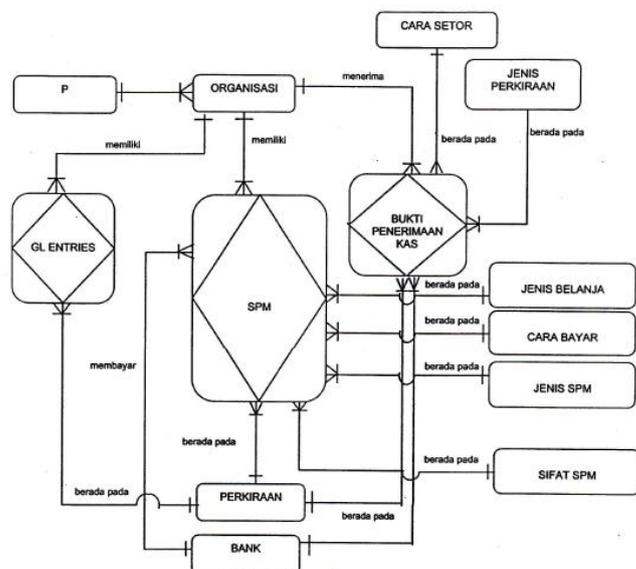
	Kode bank bayar No rekening Kode cara bayar Kode jenis SPM Kode sifat SPM Kode perkiraan Jumlah Penanggung jawab
Perkiraan	Kode perkiraan Deskripsi perkiraan
Bank	Kode bank Nama bank
P	Kode P Deskripsi P
Jenis belanja	Kode jenis belanja Deskripsi jenis belanja
Cara bayar	Kode cara bayar Deskripsi cara bayar
Jenis SPM	Kode jenis SPM Deskripsi jenis SPM
Sifat SPM	Kode sifat SPM Deskripsi sifat SPM
GL Entries	Kode organisasi Kode P Kode perkiraan Jumlah Tahun posting Bulan posting Tanggal posting Penanggung jawab
Bukti pnerimaan kas	Kode organisasi Kode P Kode perkiraan Jumlah Tahun posting Bulan posting Tanggal posting Penanggung jawab
Cara setor	Kode cara setor Deskripsi cara setor
Jenis penerimaan	Kode jenis penerimaan

	Deskripsi jenis penerimaan
--	----------------------------

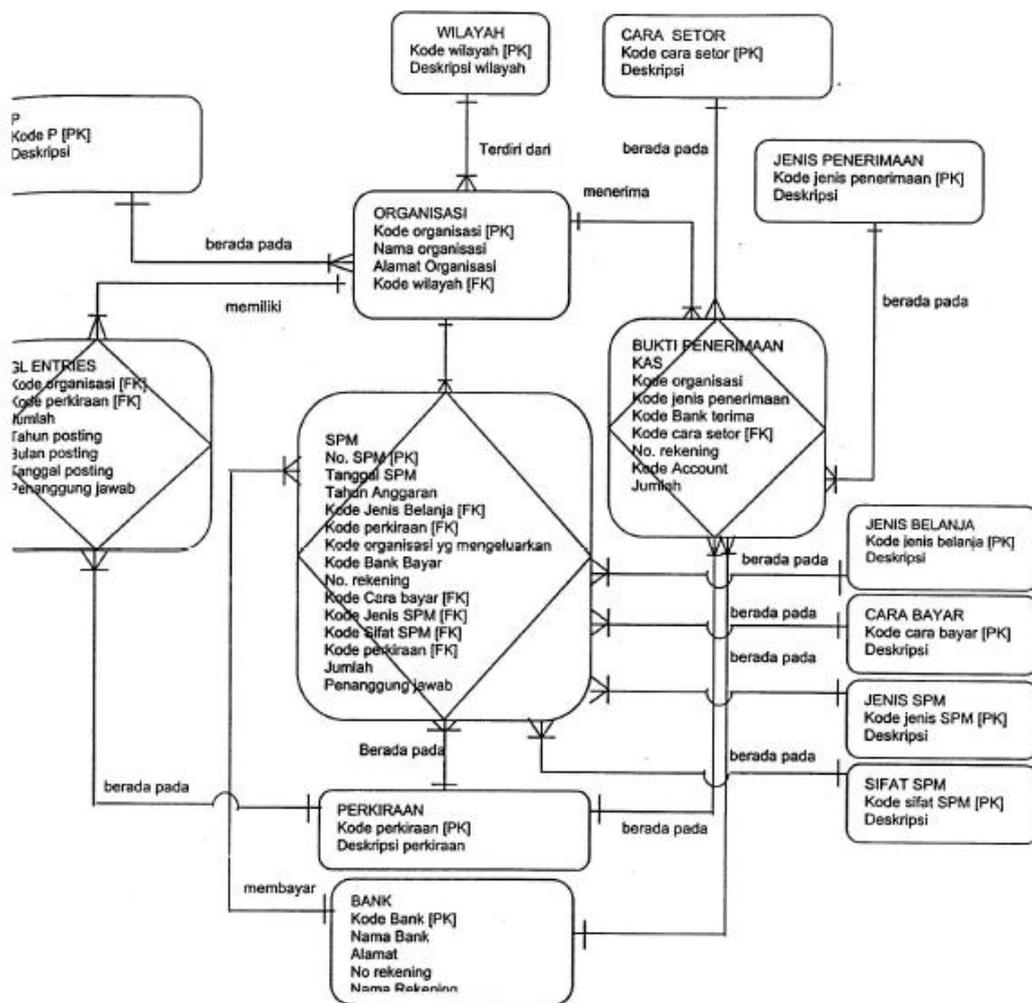
Atribut-atribut Primary Key dan Candidat Key

Entity/Relationship	Primaru Key	Alternate Key
Organisasi	Kode organisasi	
Wilayah	Kode wilayah	
SPM	No SPM	
Perkiraan	Kode perkiraan	
Bank	Kode bank	
P	Kode P	
Jenis belanja	Kode jenis belanja	
Cara bayar	Kode cara bayar	
Jenis SPM	Kode jenis SPM	
Sifat SPM	Kode sifat SPM	
GL Entries	Kode perkiraan	
Bukti pnerimaan kas	Kode organisasi	
Cara setor	Kode cara setor	
Jenis penerimaan	Kode jenis penerimaan	

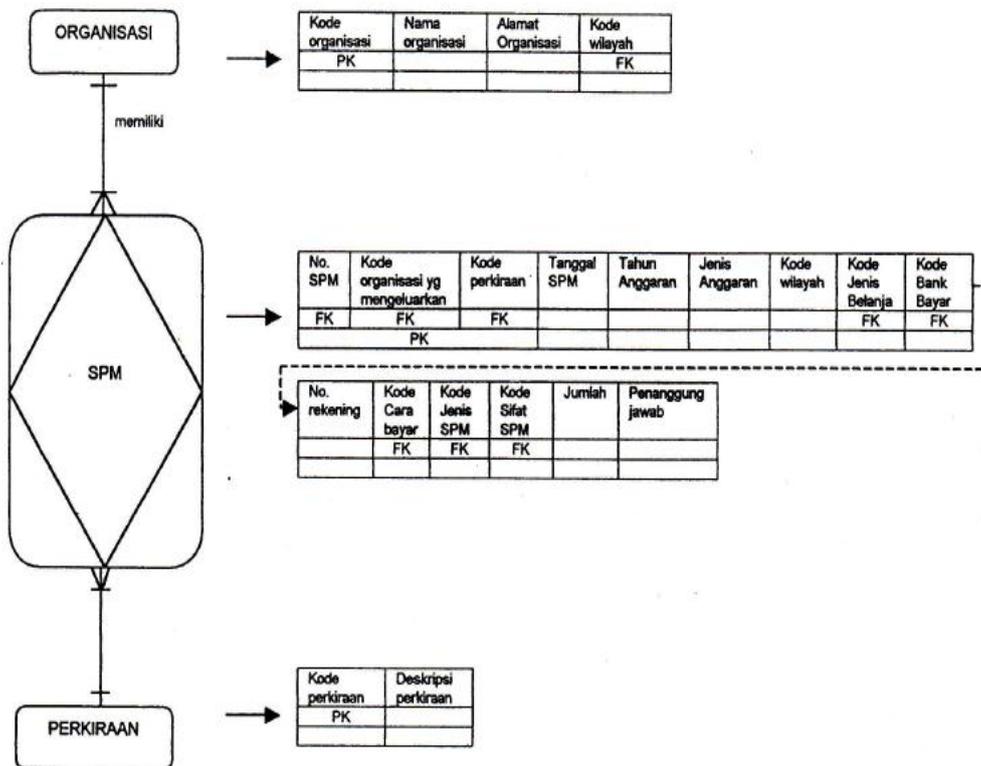
Berikut ini adalah gambar diagram ERD untuk sistem KAR Jakarta.



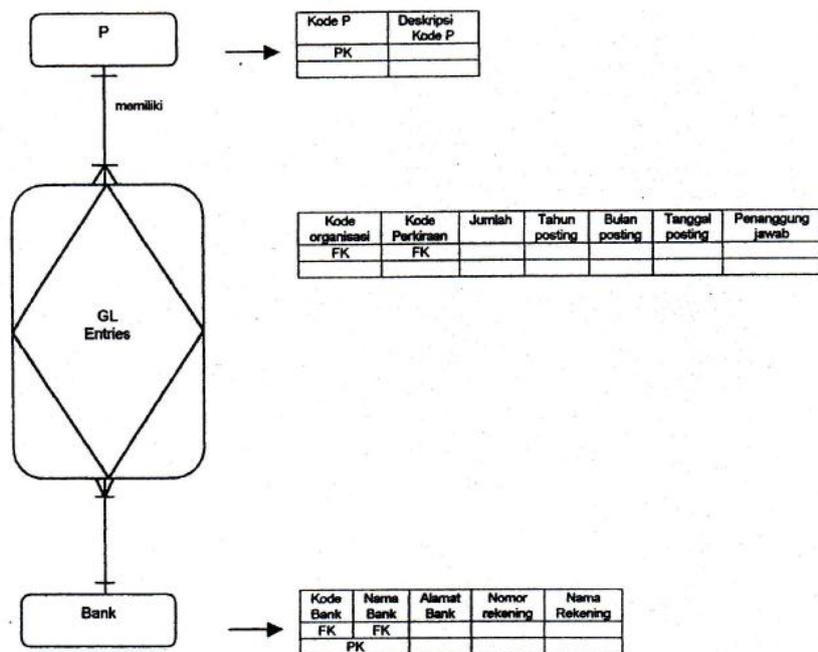
Gambar 1.6
 ERD Sistem KAR Jakarta



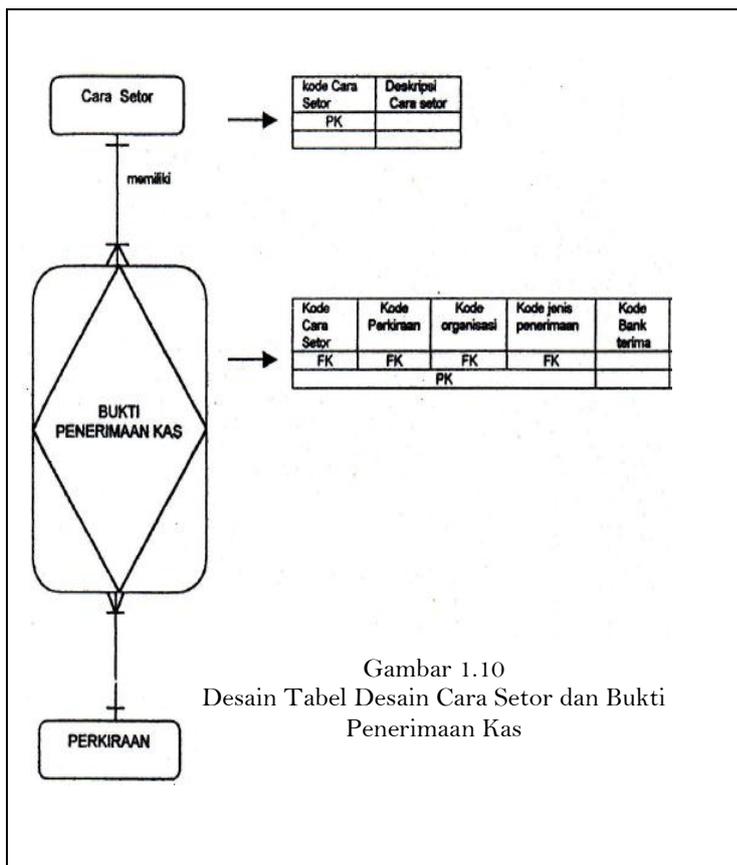
Gambar 1.7
 A Fully Attributed ERD Sistem KAR Jakarta



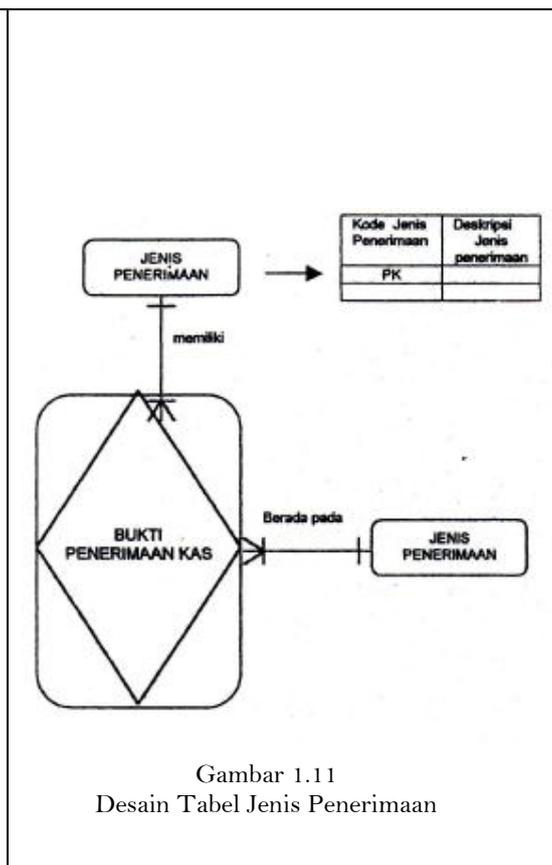
Gambar 1.8
 Desain Tabel Organisasi, SPM, dan Perkiraan



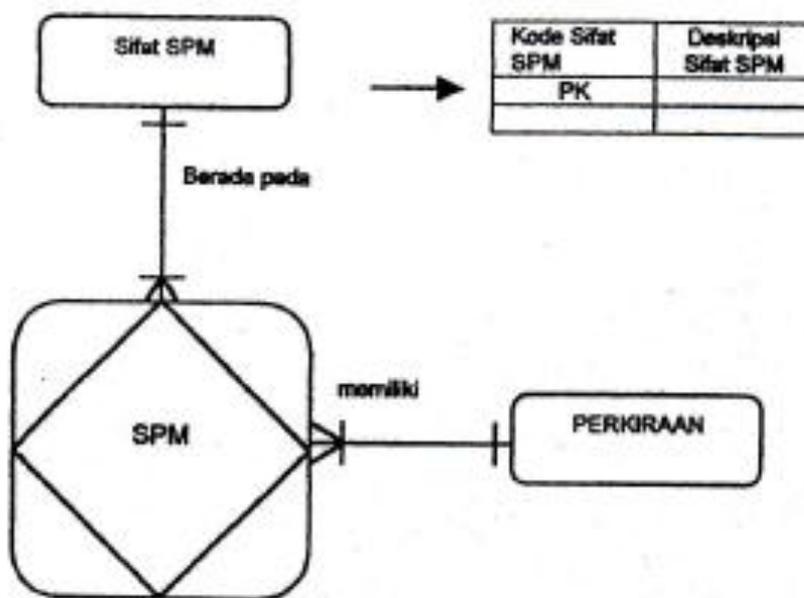
Gambar 1,9
 Desain Tabel P, GL Entries, dan Bank



Gambar 1.10
 Desain Tabel Desain Cara Setor dan Bukti Penerimaan Kas



Gambar 1.11
 Desain Tabel Jenis Penerimaan



Gambar 1.12
 Desain Tabel Sifat SPM

➤ **Network Modeling**

Geografi dari Sistem berjalan pada Kantor Akuntansi Regional Jakarta adalah sebagai berikut:

• **Location Decomposition Diagram**

Sistem KAR Jakarta terdiri dari sub bagian umum, seksi verifikasi, seksi

pengolahan data akuntansi, dan seksi konsolidasi. Masing-masing bagian terletak pada ruangan yang berbeda. Jika digambarkan dalam diagram lokasi akan menjadiseperti berikut ini.



Gambar 1.13
Location Decomposition Diagram KAR Jakarta

Pada lokasi Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta terdapat aplikasi *Cash Disbursement (CD)*, *Cash Receipt (CR)*, dan *General Ledger (GL)*. Pelayanan yang diberikan oleh sistem ini adalah berupa daftar *register* transaksi harian, daftar transaksi dan posting serta menyediakan GL detail bagi UAW, UAE, KAK, dan BAKUN. Pada lokasi Sub bagian umum tidak terdapat aplikasi. Disini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Pelayanan yang diberikan adalah penerimaan dokumen sumber penerimaan dan pengeluaran dan meneliti kelengkapan dokumen sumber tersebut. Pada lokasi seksi verifikasi tidak terdapat aplikasi. Disini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Pelayanan yang diberikan

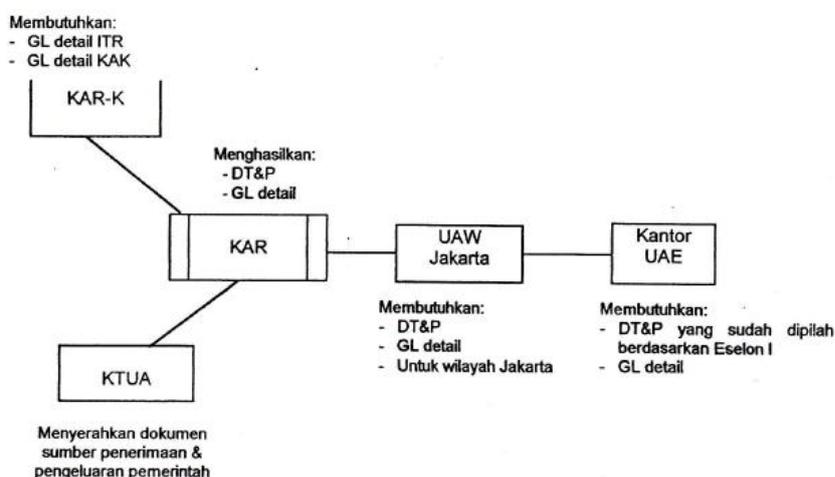
adalah pemeriksaan terhadap *register* transaksi harian (RTH). Pada lokasi SPDA terdapat aplikasi CD, CR, dan GL. Pelayanan yang diberikan adalah menyediakan RTH bagi seksi verifikasi, data transaksi dan posting bagi UAW, UAE, KAK, dan BAKUN. Pada lokasi seksi konsolidasi tidak terdapat aplikasi. Disini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Pelayanan yang diberikan adalah menggabungkan semua SPM dari bulan ke bulan atau daritahun ke tahun.

• **Location Conectivity Diagram**

Setiap bagian dari Sistem KAR Jakarta saling berhubungan. Selain itu sistem KAR Jakarta juga berhubungan dengan sistem-sistem lain yang

memberikan input data bagi sistem KAR Jakarta atau menerima *output* dari sistem KAR Jakarta. Sistem diluar KAR Jakarta tersebut adalah Sistem Unit Akuntansi Wilayah yang memberikan koreksi/memo penyesuaian atas DT&P serta GL detail yang dihasilkan oleh sistem KAR Jakarta, sistem Kantor Tata usaha Anggaran yang memberikan dokumen sumber dan arsip

data komputer pengeluaran/penerimaan pemerintah, sistem Kantor Akuntansi Khusus yang memberikan tabel master, arsip data komputer buku besar dan arsip data komputer intenegeional Kantor Akuntansi Khusus, dan sislem Unit Akuntansi Eselon I yang menerima DT&P dan GL detail dari sistem KAR Jakarta.



Gambar 1.14
 Location Conectivity Diagram

Tujuan dari sistem KAR Jakarta adalah untuk menyediakan daftar transaksi dan posting (DT&P) serta arsip data BB yang akurat dan benar bagi KP BAKUN, UAW, UAE untuk digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan tingkat kantor/proyek, laporan keuangan tingkat eselon, laporan keuangan tingkat departemen/instansi dan laporan keuangan pemerintah pusat. Tujuan tersebut amat berkaitan dengan tugas yang diemban oleh KAR yaitu melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah di daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan semakin banyaknya transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang dilakukan oleh KPKN dilihat dari jumlah dokumen sumber yang masuk ke KAR Jakarta, maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KAR Jakarta harus segera diatasi agar DT&P serta arsip data BB yang dihasilkan oleh KAR menjadi lebih benar dan akurat. Masalah-masalah/kendala yang dihadapi oleh KAR terdiri dari masalah organisasi dan sistem informasi. Oleh karena itu masalah/kendala yang dihadapi tersebut

akan dibahas berdasarkan sisi organisasi dan sistem informasi.

➤ **Struktur Organisasi KAR**

Kantor Akuntansi Regional Jakarta terdiri dari 3 bagian yaitu sub bagian umum, seksi verifikasi dan seksi pengolahan data akuntansi (SPDA) serta seksi konsolidasi. Pembagian pekerjaan ke dalam 4 bagian ini sudah tepat karena sudah terjadi pemisahan antara fungsi penerimaan, pemeriksaan, pengolahan data serta penggabungan data. Akan tetapi karena jenis pekerjaan yang dilakukan adalah jenis pekerjaan yang rutin, membutuhkan ketelitian tinggi dan tidak bervariasi maka terjadi kejenuhan pada para pegawai KAR Jakarta. Hal ini menyebabkan hasil kerja para pegawai KAR Jakarta menjadi kurang memuaskan. Kondisi yang seperti ini ditambah dengan kurangnya motivasi dan tanggung jawab dari para pegawai terhadap tugas yang diberikan kepada mereka menyebabkan hasil kerja KAR secara keseluruhan menjadi kurang baik. Mengingat fungsi yang dijalankan oleh KAR adalah fungsi yang sangat mendasar dan penting bagi pembuatan laporan keuangan yaitu antara lain menyediakan DT&P dan ADK buku besar (GL detail) bagi UAW, UAE dan KP BAKUN serta mengirimkan GL *entries* ITR dan GL detail ke KAK maka situasi yang seperti ini harus segera ditangani.

Teori harapan dari Victor Vroom mengatakan bahwa seorang *karyawan dimotivasi untuk menjalankan upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian Kinerja yang baik; suatu penitaaian yang*

baik akan mendorong ganiarcnganiaran organisasional sepefii bonus, kenaikan gaji atau suatu promosi; dan ganiannnganiann itu akan memuaskan tujuan-tujuan pibadi karyawan itu.

KAR Jakarta sebagai bagian dari organisasi yang lebih besar terikat kepada struktur organisasi Departemen Keuangan. Keputusan mengenai promosi, kenaikan gaji atau bonus ditentukan oleh pusat. Sangat sukar bagi KAR Jakarta untuk memberikan ganjaran-ganjaran organisasional kepada pegawainya. Langkah yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan rotasi pekerjaan secara berkala terhadap para pegawainya sehingga kejenuhan para pegawai agak berkurang. Langkah ini perlu dilakukan mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KAR Jakarta adalah pekerjaan yang rutin dan membutuhkan ketelitian tinggi. Langkah lain yang perlu diambil adalah mengenai promosi pegawai. Promosi pegawai selama ini ditentukan oleh pusat tanpa melihat prestasi kerja pegawai. Akan lebih baik jika setiap instansi di bawah Departemen Keuangan mengirimkan daftar prestasi kerja para pegawainya peserta bukti-bukti yang mendukung prestasitersebut ke pusat dan promosi akan dilakukan berdasarkan prestasi tersebut. Meskipun hal ini sulit untuk dilakukan tetapi para pegawai akan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya karena masih memiliki harapan untuk menerima ganjaran promosi.

➤ **Sistem Informasi**

KAR Jakarta khususnya bagian SPDA menyadari bahwa sistem yang ada saat ini

belum sempurna. Beberapa prosedur dan program yang dirasakan belum sempurna antara lain prosedur untuk penerimaan dokumen sumber, prosedur untuk verifikasi, prosedur untuk mencek SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan kegiatan yang dilakukan oleh tiap departemen/instansi yang mengajukan, dan program untuk konversi data dari DJA ke KAR yang belum sempurna sehingga data yang didapat dari hasil konversi tidak lengkap karena masih ada data yang lolos.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, terdapat dua terdapat dua alternatif untuk memecahkan masalah sistem di atas.

pertama, menyusun sistem baru yang terpadu. Kedua, memperbaiki sistem yang ada dan mengganti dengan sistem yang sama sekali baru. Terpadu berarti meliputi seluruh bagian yang terkait dan terintegrasi. memperbaiki sistem yang ada berarti tetap mempertahankan sistem yang ada dan menambahkan beberapa prosedur yang sangat dibutuhkan serta memperbaiki beberapa prosedur yang kurang baik.

Untuk menentukan alternatif mana yang harus dipilih, berikut ini akan dibahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif pada tabel berikut.

<i>Alternatif</i>	<i>Kelebihan</i>	<i>Kelemahan</i>
<i>Menyusun sistem yang baru</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem yang disusun dengan cara merombak sistem yang sedang berjalan dan membuat sistem yang sama sekali baru akan menghasilkan sistem yang benar-benar terpadu antara bagian-bagian/instansi-instansi yang terkait. • Informasi dapat dihasilkan dengan cepat karena sistem yang terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyusun sistem yang terpadu membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik untuk membayar pembuat sistem maupun untuk melengkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan. • Untuk menyusun sistem tersebut diperlukan waktu yang lama, karena skopnya luas. Sistem KAR berhubungan dengan sistem lain seperti sistem BAKUN, KAK, UAW, UAE, DJA, KTUA, KPKN dan lain-lain. • Keberhasilan suatu sistem untuk mencapai tujuan pembentukan sistem sangat tergantung kepada orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Untuk menerapkan sistem yang terintegrasi diperlukan banyak orang-orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sistem tersebut. Saat ini KAR Jakarta belum memiliki orang-orang yang berkemampuan demikian, sehingga jika akan menerapkan sistem baru yang terpadu tersebut perlu dikeluarkan biaya untuk pelatihan

<i>Alternatif</i>	<i>Kelebihan</i>	<i>Kelemahan</i>
		<i>pegawai-pegawainya</i>
<i>Memperbaiki sistem yang sudah ada</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jika dibandingkan dengan menyusun sistem yang baru, memperbaiki sistem yang sudah ada lebih murah biayanya karena skopnya tidak luas sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar penyusun dan pengadaan alat-alat yang diperlukan seperti komputer, dll tidak terlalu banyak.</i> • <i>Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem tersebut relatif tidak lama karena lingkungannya tidak luas.</i> • <i>Pegawai yang perlu pelatihan untuk menangani operasional dengan sistem ini relatif sedikit dibandingkan dengan sistem yang baru dan terpadu</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dengan hanya memperbaiki sistem yang ada di KAR Jakarta maka kelemahan operasional di instansi lain yang terkait tidak teratasi.</i> • <i>Informasi yang lengkap tidak dapat diperoleh dengan cepat karena ada informasi dari terkait yang harus dikerjakan secara manual di lokasi yang terpisah-pisah</i>

Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif sistem dan mempertimbangkan faktor biaya, waktu dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAR Jakarta, maka peneliti mengambil alternatif yang kedua yaitu memperbaiki sistem yang sudah ada sebagai sistem yang diusulkan. Berikut ini akan diuraikan usulan sistem bagi KAR Jakarta agar dapat menghasilkan *output* yang optimal.

III. SOLUSI MASALAH

a. Usulan Sistem

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh KAR Jakarta diberikan usulan sistem. Usulan sistem yang diberikan adalah berupa usulan perbaikan rancangan logik sistem bukan rancangan fisik. Berdasarkan analisis, maka untuk memperbaiki sistem yang sudah ada diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- *Memperbaiki prosedur penerimaan dokumen sumber.*
 Prosedur ini diperlukan untuk mengatasi ketidaklengkapan dokumen sumber sehingga dapat diketahui secara pasti berapa pengeluaran dan pendapatan pemerintah pada suatu waktu tertentu.
- *Memperbaiki prosedur untuk verifikasi*
 Prosedur ini diperbaiki agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
- *Memperbaiki prosedur input data dokumen sumber yang tidak disertai ADK.*
 Prosedur ini perlu dibuat agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
- *Membuat prosedur untuk mengecek kesamaan antara kode kantor dan kode bagian anggaran pada SPM.*
 Prosedur ini diperlukan agar terdapat kesesuaian antara uang yang

dikeluarkan oleh KPKN dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang menerima.

- *Membuat program konversi data yang lebih sempurna*

Prosedur ini diperlukan mengingat KAR Jakarta menerima dokumen sumber dalam bentuk arsip data komputer dari sistem KTUA yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda dengan bahasa pemrograman pada sistem KAR Jakarta. dengan demikian maka poses

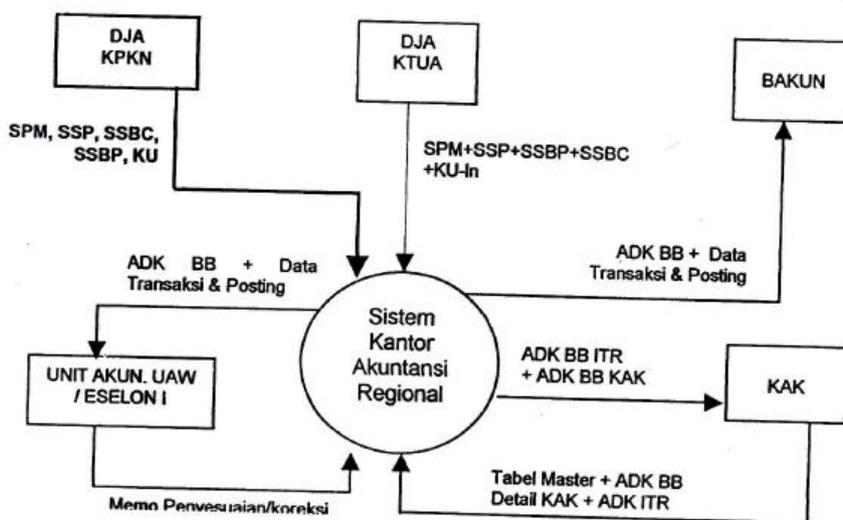
konversi yang dilakukan akan sempurna (tidak ada data yang lolos).

- *Membuat diagram sistem perbaikan*

Diagram sistem perbaikan perlu dibuat agar proses perbaikan dapat dilihat.

- **Diagram Konteks**

Diagram konteks untuk Kantor Akuntansi Regional Jakarta mengalami perubahan yaitu menjadi sebagai berikut:

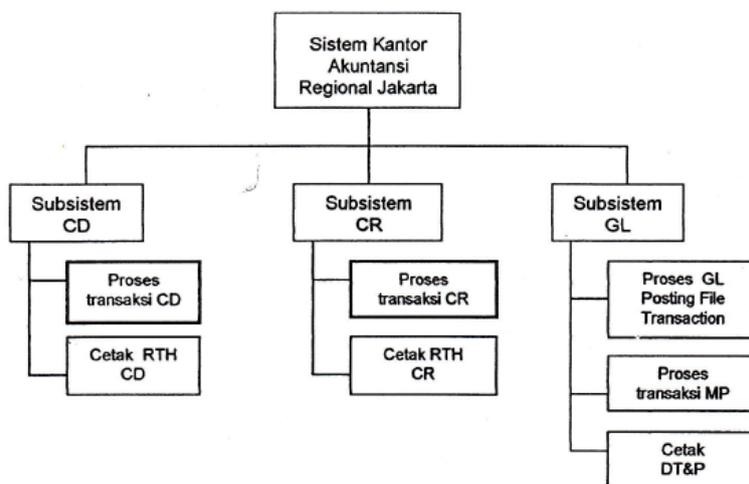


Gambar 1.15
 Diagram Konteks Kantor Akuntansi Regional Jakarta

Dengan ditambahkan *external* entity DJA KPKN di atas maka sistem KAR Jakarta dapat menerima dokumen sumber langsung dari instansi yang menerbitkan/menerima dokumen sumber (KPKN) sehingga masalah ketidaklengkapan dokumen sumber dapat segera teratasi.

- **Functional Decomposition Diagram**

Perubahan pada *Functional Decomposition Diagram* Akuntansi Regional adalah sebagai berikut terjadi transaksi CD dan transaksi CR. Sehingga menjadi:



Gambar 1.16
 Perubahan pada *Functional Decomposition Diagram*
 Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta

• **Event-Response List**

Perubahan yang terjadi untuk Event bisnis yang harus direspon serta respon yang harus diberikan oleh Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta adalah sebagai berikut:

Subsistem Cash Disbursement

No.	Event
1	KAR menerima informasi tabel master dari Kantor Akuntansi Khusus (KAK).
2	Permintaan DS pengeluaran pemerintah ke KPKN untuk DS yang tidak lengkap.
3	KAR menerima ADK <i>interface</i> dan DS dari KTUA
4	Sub bagian umum memberikan catatan pada seksi verifikasi dan SPDA tentang DS pengeluaran pemerintah yang tidak disertai ADK.
5	SPDA mengkonversi clatra (ADK)

No.	Event
	yang diterima dari Sub bagian Umum.
6	Input data transaksi pengeluaran pemerintah tanpa ADK di minikomputer KAR Jakarta
7	DJA KPKN menyerahkan DS pengeluaran pemerintah ke KAR.
8	Mencek kesamaan antara kode pos dan kode bagian anggaran.
9	Seksi verifikasi mencocokkan DS dengan RTH dan merecheck RTH yang telah dicocokkan.
10	SPDA memperbaiki RTH.
11	Seksi verifikasi meminta pembentukan GL <i>entries</i> kepada SPDA.

Subsistem Cash Receipt

No.	Event
1	KAR menerima informasi tabel master dari Kantor Akuntansi Khusus (KAK).
2	KAR menerima ADK <i>interface</i> dan DS

No.	Event
	penerimaan pemerintah dari KTUA.
3	Permintaan DS penerimaan pemerintah ke KPKN.
4	Sub bagian umum memberikan catatan pada seksi verifikasi dan SPDA tentang DS penerimaan pemerintah yang tidak disertai ADK.
5	SPDA mengkonversi data (ADK) yang diterima dari Sub bagian Umum.
6	Input data transaksi penerimaan pemerintah tanpa AD di minikomputer KAR Jakarta.
7	DJA KPKN menyerahkan DS penerimaan pemerintah.
8	Seksi verifikasi mencocokkan DS penerimaan pemerintah dengan RTH dan merecheck RTH yang telah dicocokkan.
9	Seksi verifikasi mencocokkan DS penerimaan pemerintah dengan RTH dan merecheck RTH yang telah dicocokkan.
10	SPDA memperbaiki RTH.
11	Seksi verifikasi meminta pembentuk GL <i>entries</i> kepada SPDA.

Subsistem General Ledger (tidak ada yang perlu disempurnakan/diubah)

No.	Event
1	KAR menerima informasi tabel master dari Kantor Akuntansi Khusus (KAK).
2	SPDA melakukan posting..
3	SPDA mencetak DT&P.
4	Seksi verifikasi membuat pengantar

No.	Event
	ADK dan DT&P untuk instansi.
5	Pencetakan <i>register</i> pengiriman GL detail untuk KP BAKUN, UAW, dan UAE oleh SPDA.
6	Ekspor <i>file</i> GL detail ke KP BAKUN, KAK, UAW, dan UAE.
7	Memasukkan transaksi MP dari UAW ke subsistem buku besar.
8	Pemeriksaan RTH oleh seksi verifikasi.
9	Pembentukan GL <i>entries</i> MP.
10	Posting batch MP ke buku besar.

- **Network Modeling**

Berdasarkan analisa CSF maka network modeling untuk sistem KAR Jakarta menjadi sebagai berikut:

- a. *Location Decomposition Diagram*

Tidak mengalami perubahan karena berdasarkan geografi yang dimiliki sistem KAR Jakarta tersebut tidak menimbulkan masalah.

- b. *Location Conectivity Diagram*

Ada sedikit perubahan, yaitu dengan menambahkan hubungan ke sistem Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Ini dilakukan untuk memecahkan masalah dokumen sumber yang tidak rangkap. Dokumen sumber yang dimaksud adalah dokumen sumber pengeluaran pemerintah, yaitu SPM dan dokumen sumber penerimaan pemerintah, yaitu:

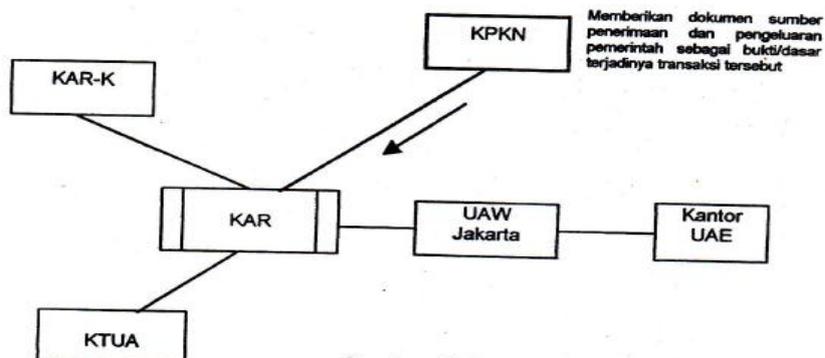
- SSP untuk pendapatan dari penerimaan pajak, *VAT receipt*,

rental tax receipt, dan penerimaan pajak lainnya.

- SSBC untuk pendapatan bea dan cukai
- SSBP untuk pendapatan bukan pajak, seperti pendapatan dari minyak, pendapatan sewa, pendapatan dari penjualan, dan pendapatan lainnya.
- SSBP UYHD untuk UYHD Rutin dan UYHD pembangunan.
- KU-In untuk *transfer* kas.

KTUA mendapat dokumen tersebut dari KPKN dan melaporkannya ke KAR Jakarta. Dengan ditambahkannya hubungan langsung ke KPKN maka dokumen sumber yang tidak ada dapat langsung ditanyakan ke KPKN sebagai instansi yang menerbitkan dan menerima dokumen sumber. Jika dokumen sumber sudah lengkap maka *register* transaksi harian dari KTUA yang telah dicetak oleh SPDA dapat segera dicocokkan dengan dokumen sumbernya sehingga data transaksi yang dihasilkan adalah data yang sah dan akurat

Selama ini KAR Jakarta hanya menerima dokumen sumber dari KTUA.



Gambar 1.17
 Location Conectivity Diagram

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Sistem Akuntansi pemerintah pusat di Kantor Akuntansi Regional Jakarta serta masalah-masalah yang dihadapi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Kantor Akuntansi Regional (KAR) adalah instansi vertikal BAKUN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAKUN. Dalam

menyelenggarakan tugasnya KAR berfungsi sebagai pengumpulan dan verifikasi dokumen transaksi keuangan pemerintah, pengolahan data transaksi keuangan pemerintah, pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi, pelaksanaan sistem akuntansi pusat, analisis laporan keuangan pemerintah, bimbingan teknis SAP termasuk Sistem Akuntansi Aset Tetap kepada unit-unit

akuntansi diwilayah kerjanya, dan pelaksanaan administrasi KAR.

- KAR Jakarta menggunakan subsistem-subsistem *cash disbursement* (pengeluaran), *cash receipt* (penerimaan), dan *general ledger* (buku besar) untuk menjalankan fungsinya.
- KAR Jakarta memiliki masalah/kendala dalam melaksanakan tugasnya, antara lain dokumen sumber yang tidak lengkap, verifikasi data yang belum cermat, program konversi data yang digunakan masih kurang sempurna, elemen data SPM yang belum benar, dan kurangnya motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya.
- Dari hasil analisis *Critical Success Factor* (CSF) diperoleh bahwa aktifitas-aktifitas kunci yang harus dilakukan oleh KAR Jakarta agar dapat berhasil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menghasilkan data transaksi dan posting serta GL detail yang akurat dapat diidentifikasi maka KAR Jakarta *harus memiliki dokumen sumber yang lengkap, pegawai yang memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, prosedur verifikasi yang baik, infrastruktur yang memadai pada instansi terkait serta memperbaiki sistem yang sudah ada.*
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aplikasi perangkat lunak sistem KAR Jakarta maka dapat diketahui bahwa aplikasi yang harus dipelihara, ditingkatkan, dan dikembangkan lebih lanjut adalah aplikasi *GL, CD dan*

CR karena memiliki nilai bisnis dan teknis yang tinggi. Aplikasi yang harus diperbarui adalah program konversi data karena memiliki nilai bisnis yang tinggi namun nilai teknisnya rendah.

- Dari hasil analisis terhadap proses yang terjadi pada sistem KAR Jakarta dengan menggunakan metode *Data Flow Diagram* (DFD) diketahui bahwa ada prosedur dan program yang harus dibuat ataupun diperbaiki. Prosedur-prosedur atau program harus diperbaiki adalah *prosedur penerimaan dokumen sumber, prosedur untuk verifikasi, prosedur input data dokumen sumber yang tidak disertai ADK, dan program konversi data. Prosedur baru yang harus dibuat adalah prosedur untuk mengecek kesamaan antara kode kantor dan kode bagian anggann pada SPM.*

Hasil analisis terhadap data sistem KAR Jakarta dengan menggunakan metode *Entity Relationship Diagram* (ERD) menghasilkan Tabel relasional yang dapat digunakan untuk membuat usulan data untuk sistem berjalan. Hasil analisis terhadap struktur geografi sistem KAR Jakarta dengan menggunakan metode *Network Modeling* ditemukan bahwa dibutuhkan suatu hubungan antara KAR Jakarta dengan KPKN sebagai instansi yang menerbitkan dokumen sumber pengeluaran kas pemerintah dan penerima dokumen sumber penerimaan kas pemerintah. Hubungan dengan KPKN ini dibutuhkan agar ketidaklengkapan dokumen sumber yang diterima oleh KAR Jakarta dari KTUA dapat

segera dilaporkan ke KPKN dan meminta KPKN untuk mengirimkan dokumen sumber yang dibutuhkan. Dengan demikian maka data transaksi yang dihasilkan dapat lebih

dipertanggungjawabkan karena memiliki dokumen sumber sebagai bukti tedadinya transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi, *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-4, ISBN/ISSN : 979-414-537-8, 1990
- Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, *Komputerisasi sistem Akuntansi Pemerintah*, Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, 1999
- Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, *Modul Sistem Akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) versi 2.0 untuk Lembaga*, Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, 1999
- Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, *Pengelolaan Keuangan Negara*, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Buku Besar*, BAKUN, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Cash Disbursement*, BAKUN, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Cash Receipt*, BAKUN, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Tabel Master*, BAKUN, 1999
- BAPPENAS, & Departemen Keuangan, *Petunjuk Teknis Pengisian DIP Tahun Anggaran 1999/2000*, BAPPENAS dan Departemen Keuangan, 1999
- Baswir, Revrison, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2000
- Bodnar, George M. & Hopwood, William S., *Accounting Information System*, edisi 4, (Boston: Allyn & Bacon), 1980
- Connolly, Thomas E. & Begg, Carolyn E., Strachan, Anne D., *Database System*, Addison Wesley Publishing Company, 1997
- H.M.' Yogiarto., *Analisis & Disain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi*, Edisi kedua, cetakan pertama, (Penerbit Andi Yogyakarta), 1999
- Harris, David, *System Analysis & Design*, Edisi 2, (The Dryden Press), 1999

- KAR Jakarta, *Urutan Kerja Pegawai KAR Jakarta*, KAR Jakarta, 2000
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1135/KMK/01/1992 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Keuangan Negara*
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, cetakan ke.11, Ende: penerbit Nusa indah, 1997
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi 3, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekorah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN), 1997
- Perry, James T., & Schneider, Garry P., *Building Accounting Systems*, (South Westem College Publishing), 1995
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: Cash Disbursement for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: Cash Receipt for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: General Ledger for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: Master Tabel for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- Robbins, Stephen, *Organizational Behaviour*, Prentice Hall, 1998
- Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul John, Cushing, Barry E., *Accounting Information System*, Seventh Edition, Addison Wesley, 1997
- Saputra, Gede, *Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia*, Jakarta PT.Gramedia, 2000
- Sulaiman, Anita, *Evaluasi Terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah di Indonesia*, unpublished Bachelor dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992
- Turban, Efraim & McLean. Efraim, Wetherbe, James, *Information Technology for Management*, John Wiley & Son, 1996
- Whitten, Jeffery L. & Bentley, Lonnie D, *System Analysis and Design*, fourth edition, (Irwin McGraw-Hill), 1999
- Yusna, Dewi, *Prospek dan Kendala Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah*, www.mep.ugm.ac.id/kuliah/file.php/1/Artikel/Akuntansi_Pemerintah/mp082200128.pdf, 2001.